

## Menilai Efektivitas Program Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Mempromosikan Nilai-Nilai Demokrasi

Gustriani Putri<sup>1,a\*</sup>, Adellia<sup>2,a</sup>, Melisa Diana Putri<sup>3,a</sup>, Ilham Hudi<sup>4,a</sup>, Widi Srihayuning<sup>5,a</sup>, Ika Yulianingsih<sup>6,a</sup>

<sup>a</sup> Universitas Muhammadiyah Riau, Indonesia

<sup>1</sup> putrigustriani396@gmail.com\*

\*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 10 Juni 2024;

Revised: 25 Juni 2024;

Accepted: 30 Juni 2024.

Kata-kata kunci:

Pendidikan

Kewarganegaraan;

Demokrasi;

Pembelajaran;

Toleransi.

: ABSTRAK

Demokrasi merupakan proses pengambilan keputusan dalam masyarakat yang idealnya melibatkan dialog dan diskusi rasional, inklusif, serta toleran antara individu dan kelompok yang beragam. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi efektivitas program pendidikan kewarganegaraan dalam mempromosikan nilai-nilai demokrasi melalui pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di sekolah. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber terkait. Penilaian efektivitas program pendidikan kewarganegaraan dalam mempromosikan nilai-nilai demokrasi adalah tugas kompleks dan berkelanjutan. Penelitian ini mengadopsi pendekatan multi-metode, membangun indikator yang jelas, serta mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi efektivitas. Dengan pendekatan ini, penelitian ini berupaya memberikan kontribusi terhadap perbaikan program Pendidikan Kewarganegaraan. Hasil penelitian diharapkan dapat membantu generasi mendatang menjadi warga negara yang lebih demokratis dan bertanggung jawab, dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang nilai-nilai demokrasi. Temuan ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengembangan kurikulum dan kebijakan pendidikan kewarganegaraan yang lebih efektif.

ABSTRACT

*Assessing the Effectiveness of Citizenship Education Programs in Promoting Democratic Values. Democracy is a decision-making process in society that ideally involves rational, inclusive, and tolerant dialogue and discussion among diverse individuals and groups. This research aims to explore the effectiveness of civic education programs in promoting democratic values through Citizenship Education in schools. The method used is a literature review, collecting and analyzing various related sources. Assessing the effectiveness of civic education programs in promoting democratic values is a complex and ongoing task. This study adopts a multi-method approach, establishes clear indicators, and considers various factors that influence effectiveness. Through this approach, the research seeks to contribute to the improvement of Citizenship Education programs. The results of the study are expected to help future generations become more democratic and responsible citizens, with a deeper understanding of democratic values. These findings are also expected to serve as a reference for the development of more effective civic education curricula and policies.*

Keywords:

Citizenship Education;

Democracy;

Learning;

Tolerance.

Copyright © 2024 (Gustriani Putri, dkk). All Right Reserved

How to Cite : Putri, G., Adellia, A., Putri, M. D., Hudi, I., Srihayuning, W., & Yulianingsih, I. (2024). Menilai Efektivitas Program Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Mempromosikan Nilai-Nilai Demokrasi. *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 4(6), 219–224. <https://doi.org/10.56393/decive.v4i6.2381>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

## Pendahuluan

Pendidikan adalah sebuah upaya yang dijalankan secara sadar dan terencana, dengan tujuan utama menciptakan lingkungan belajar yang mendukung dan memfasilitasi proses pembelajaran. Melalui pendidikan, peserta didik diajak untuk secara aktif menggali, mengembangkan, dan mengoptimalkan potensi-potensi unik yang dimiliki oleh setiap individu. Hal ini tidak hanya mencakup aspek intelektual, melainkan juga dimensi-dimensi lainnya seperti kekuatan spiritual dan keagamaan yang memperkuat nilai-nilai etika dalam diri seseorang. (Julfian et al., 2023).

Pendidikan kewarganegaraan muncul sebagai pendekatan pendidikan kewarganegaraan yang alternatif, lebih dinamis, kritis, dan inklusif, yang dipromosikan oleh otoritas pendidikan nasional dan negara bagian. Pendidikan kewarganegaraan seringkali merupakan mata pelajaran yang bersifat top-down dan sangat normatif yang mendorong konformitas, kepatuhan, dan kepasifan melalui representasi masyarakat yang statis. Penting untuk dicatat bahwa program kewarganegaraan tradisional di Perancis atau Amerika sebagian besar berkaitan dengan status quo dan tidak mendorong siswa untuk melihat secara kritis masyarakat, meningkatkan kesadaran sosial, atau mendorong tindakan sosial demi masyarakat yang lebih adil. (Adenta et al., 2024)

Pendidikan kewarganegaraan telah menjadi topik perdebatan selama lebih dari setengah abad, dengan berbagai organisasi dan gerakan yang mempromosikan konsep tersebut. Pendanaan Badan Pembangunan Internasional Kanada pada tahun 1960an memunculkan minat baru terhadap pendidikan kewarganegaraan global. Berbagai visi kewarganegaraan telah dikemukakan oleh para pendidik, termasuk konsep Heater tentang “warga negara ganda”, deskripsi Selby tentang “kewarganegaraan jamak dan parallel”, dan konstruksi Hébert tentang “kewarganegaraan baru yang fleksibel”. (Wulandari et al., 2024)

Kewarganegaraan merupakan aspek penting dalam pendidikan, karena memberikan makna bagi kemajuan dan prestasi manusia. Pendidikan memainkan peran penting dalam mengatasi risiko serius seperti masalah kesehatan, perang, dan degradasi lingkungan. Kewarganegaraan, awalnya diusulkan dalam ilmu-ilmu sosial, telah berkembang menjadi bidang dasar dalam Pendidikan. Oleh karena itu, negara-negara selalu memprioritaskan pendidikan warga negaranya, dengan kewarganegaraan yang aktif dan efektif menjadi tujuan utama dalam banyak kurikulum. Laporan Asosiasi Internasional untuk Evaluasi Kemajuan Pendidikan pada tahun 1995 menyoroti pentingnya mengatasi masalah-masalah ini dalam pendidikan untuk memastikan pemahaman dan apresiasi yang lebih baik terhadap dunia. (Wulandari et al., 2024)

Melalui pembelajaran PKn, peserta didik diharapkan dapat memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara, menghargai keberagaman, dan menerapkan perilaku anti-diskriminasi. Integrasi pendidikan demokrasi dalam PKn menjadi sangat relevan dan penting, karena mata pelajaran ini membahas konsep-konsep kewarganegaraan, demokrasi, dan nilai-nilai kebangsaan yang erat kaitannya. Namun, efektivitas pendidikan demokrasi dalam pembelajaran PKn di sekolah masih menghadapi berbagai tantangan dan hambatan. Beberapa tantangan yang sering dihadapi antara lain keterbatasan pengetahuan dan kompetensi guru dalam mengintegrasikan pendidikan demokrasi, kurangnya sumber daya dan bahan ajar yang spesifik, serta metode pembelajaran yang kurang efektif. (Declara, 2024)

Keterbatasan pengetahuan dan kompetensi guru menjadi salah satu tantangan utama. Banyak guru yang memiliki pemahaman yang terbatas mengenai konsep dan prinsip-prinsip demokrasi, sehingga sulit untuk mengintegrasikannya dalam pembelajaran secara efektif. Hal ini dapat berdampak pada kualitas pendidikan demokrasi yang diterima oleh peserta didik. Selain itu, kurangnya sumber daya dan bahan ajar yang spesifik tentang demokrasi juga menjadi kendala dalam menyampaikan materi secara komprehensif dan kontekstual. Buku teks yang ada seringkali hanya membahas demokrasi secara umum dan kurang memberikan contoh-contoh yang dekat dengan kehidupan peserta didik. (Declara, 2024)

Metode pembelajaran yang kurang efektif juga menjadi tantangan dalam efektivitas pendidikan demokrasi. Masih banyak guru yang menggunakan metode pembelajaran yang konvensional dan kurang melibatkan partisipasi aktif peserta didik. Padahal, pembelajaran demokrasi seharusnya bersifat partisipatif, transformatif, dan menggunakan pendekatan yang kontekstual agar lebih bermakna bagi peserta didik. Kurangnya dukungan dari lingkungan sekolah juga turut menjadi kendala dalam efektivitas pendidikan demokrasi. Dukungan dari seluruh elemen sekolah, seperti kepala sekolah, guru, staf, dan orang tua, sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi penerapan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah. (Declara, 2024)

Melalui pendidikan kewarganegaraan mengenai demokrasi, Masalah tersebut mungkin meliputi kurangnya pemahaman dan kesadaran akan pentingnya pendidikan demokrasi, keterbatasan sumber daya pendidikan, ketidaktepatan metode pengajaran yang digunakan, serta ketidakmampuan guru dalam memfasilitasi dan mengintegrasikan nilai-nilai demokrasi ke dalam pembelajaran sehari-hari. (Moh. Ferdi Hasan, 2023)

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi efektivitas program pendidikan kewarganegaraan dalam mempromosikan nilai-nilai demokrasi melalui pembelajaran PKn di sekolah. Secara khusus, penelitian ini berusaha untuk: Mengidentifikasi integrasi pendidikan demokrasi dalam kurikulum PKn di sekolah. Menganalisis metode dan strategi pembelajaran yang digunakan dalam mengajarkan pendidikan demokrasi melalui PKn di sekolah dasar. Mengkaji tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam efektivitas pendidikan demokrasi melalui pembelajaran PKn di sekolah (Declara, 2024). Merumuskan rekomendasi untuk menilai efektivitas program pendidikan kewarganegaraan dalam mempromosikan nilai-nilai demokrasi.

## Metode

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur untuk mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber literatur terkait dengan efektivitas program pendidikan kewarganegaraan dalam mempromosikan nilai-nilai demokrasi. Sumber literatur yang digunakan meliputi buku teks, jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan sumber-sumber lain yang relevan.

## Hasil dan pembahasan

Pendidikan kewarganegaraan juga memainkan peran dalam membentuk sikap dan nilai-nilai yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Hal ini termasuk pemahaman tentang hak asasi manusia, keadilan, persamaan, toleransi, dan penghargaan terhadap pluralisme dalam masyarakat. Dengan demikian, pendidikan politik tidak hanya berfokus pada aspek pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan karakter dan moralitas yang sesuai dengan tuntutan sebuah masyarakat yang demokratis. (Lubis, 2023)

Pancasila adalah ideologi dasar negara Indonesia yang telah menjadi landasan dalam membentuk identitas nasional Indonesia. Pancasila mencerminkan nilai-nilai Indonesia yang inklusif, seperti gotong royong, musyawarah untuk mufakat, keadilan sosial, dan demokrasi. (Eli Nurlaela et al., 2020)

Nilai ini menekankan pentingnya perlakuan yang adil terhadap semua individu tanpa memandang agama, ras, suku, dan jenis kelamin. Pendidikan toleransi mengajarkan siswa untuk menghargai hak asasi manusia dan keadilan sosial. Pancasila menekankan nilai-nilai demokrasi dan partisipasi warga negara dalam pengambilan keputusan. Pendidikan toleransi mempromosikan diskusi, dialog, dan pemahaman antaragama sebagai bentuk demokrasi dalam konteks keragaman agama. (Goli & Santosa, 2023)

Menilai efektivitas program pendidikan kewarganegaraan (PKn) dalam mempromosikan nilai-nilai demokrasi merupakan hal yang kompleks dan membutuhkan berbagai perspektif. Berikut beberapa poin penting yang dapat dipertimbangkan (Wulandari et al., 2024). Pendekatan multi-metode

diperlukan untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif. Hal ini dapat mencakup: (1). Survei: Mengukur pengetahuan, sikap, dan perilaku siswa terkait nilai-nilai demokrasi. (2). Studi Kasus: Menganalisis program PKn tertentu secara mendalam untuk memahami implementasi dan dampaknya. (3). Wawancara: Memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang pengalaman dan perspektif siswa, guru, dan pemangku kepentingan lainnya. (4) Observasi: Mengamati bagaimana nilai-nilai demokrasi diajarkan dan dipraktikkan di kelas dan di lingkungan sekolah. (Wulandari et al., 2024)

Meningkatkan efektivitas promosi pendidikan kewarganegaraan dalam menanamkan nilai-nilai demokrasi pada generasi muda membutuhkan upaya berkelanjutan dan kolaboratif dari berbagai pihak. Dengan mengembangkan strategi promosi yang kreatif, inovatif, dan terukur, serta mengatasi berbagai tantangan dan hambatan, kita dapat mempersiapkan generasi muda yang menjadi warga negara yang demokratis, partisipatif, dan bertanggung jawab. (Eli Nurlaela et al., 2020)

Kurikulum pendidikan adalah salah satu wadah penting di mana nilai-nilai Pancasila diintegrasikan dalam proses pendidikan di Indonesia. Sejak masa awal kemerdekaan, Pancasila telah menjadi fondasi filosofis negara dan, oleh karena itu, memegang peranan sentral dalam pengembangan sistem pendidikan. Melalui kurikulum, nilai-nilai ini diupayakan untuk diajarkan kepada generasi muda dengan harapan bahwa mereka akan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari mereka. (Purnomo et al., 2023)

Sejarah kurikulum pendidikan di Indonesia mencerminkan perkembangan implementasi nilai-nilai Pancasila. Dalam perkembangan awal, upaya untuk memasukkan nilai-nilai ini dalam kurikulum masih memerlukan pengkajian lebih lanjut. Namun, seiring berjalannya waktu, kesadaran akan pentingnya nilai-nilai Pancasila semakin tumbuh dan diresmikan dalam berbagai undang-undang dan peraturan pendidikan. (Purnomo et al., 2023)

Berbagai faktor dapat memengaruhi efektivitas program PKn, seperti: (1) Kurikulum yaitu isi kurikulum PKn, metode pengajaran, dan ketersediaan sumber daya. (2) Kualitas Guru yaitu keterampilan, pengetahuan, dan komitmen guru dalam mengajar PKn. (3) Budaya Sekolah yaitu budaya sekolah yang mendukung nilai-nilai demokrasi dan partisipasi siswa dan. (4) Keterlibatan Orang Tua dan Masyarakat yaitu dukungan dan keterlibatan orang tua dan masyarakat dalam program PKn. (Sari & Rambe., 2024)

Demokrasi merupakan proses pengambilan keputusan dalam masyarakat seharusnya melibatkan dialog dan diskusi yang rasional, inklusif, dan toleran antara individu dan kelompok yang berbeda. Dalam konteks keberagaman dan kemajemukan, teori demokrasi deliberatif dapat membantu menjelaskan bagaimana proses pengambilan keputusan yang demokratis dan inklusif dapat mempromosikan keberagaman dan kemajemukan di Indonesia. (Marbun, 2023)

Efektivitas nilai demokrasi toleransi sudah diimplementasikan. Hal ini dapat dibuktikan dengan saling menghargai dan menghormati pelaksanaan ibadah masing-masing agama dan keyakinan, selain itu, dalam kegiatan pembelajaran pendidikan agama Islam peserta didik non-muslim tetap mengikuti kegiatan pembelajaran dikelas dengan tidak membuat gaduh. Dan dalam pergaulan sesama peserta didik tidak memilih teman berdasarkan agama, keadaan fisik, guru juga memberikan pemahaman untuk mengajak peserta didik untuk menghargai dan membantu peserta didik yang berkebutuhan khusus. Di sekolah peserta didikselalu menunjukkan sikap sopan santun kepada semua warga sekolah. (Rukmini, 2021)

Adapun beberapa nilai-nilai demokrasi sebagai berikut: (1) Nilai Demokrasi Toleransi. (2) Nilai Demokrasi Kebebasan Mengemukakan Pendapat. (3) Nilai Demokrasi Terbuka Dalam Berkomunikasinya. (4) Nilai Demokrasi Percaya Diri. (5) Nilai Demokrasi Tanggung Jawab. (6) Nilai Demokrasi Kerjasama. (Rukmini, 2021)

Faktor Pendorong efektivitas Nilai-Nilai Demokrasi Dalam Pembelajaran Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan sebagai berikut: (1) Keteladanan dari Bapak/Ibu guru dengan memberikan contoh perilaku yang baik kepada peserta didik dengan tujuan agar peserta didik meniru tingkah laku

yang dicontohkan. (2) Sarana dan prasarana yang memadai misal dalam kegiatan pembelajaran guru memanfaatkan kecanggihan teknologi. (3) Pemberian motivasi yaitu apresiasi berupa nilai tambah atau poin plus kepada peserta didik yang aktif dalam kegiatan pembelajaran. (Rukmini, 2021)

Faktor penghambat efektivitas nilai-nilai demokrasi dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan sebagai berikut: (1) Faktor dari dalam diri peserta didik, perbedaan karakter masing-masing peserta didik misalnya ada peserta didik yang pemalu, minder, tidak berani dalam berpendapat. (2) Pengaruh lingkungan, perbedaan latar belakang yang berasal dari keluarga, pendidikan sebelumnya, lingkungan masyarakat dapat mempengaruhi sikap peserta didik. (3) Kurang perhatian dari orangtua, orangtua yang lepas kontrol dan tidak ikut memperhatikan perkembangan peserta didik terutama di rumah juga sangat mempengaruhi perkembangan sikap dan karakter dari peserta didik. (Rukmini, 2021)

Ada beberapa rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas program PKn dalam mempromosikan nilai-nilai demokrasi: (1) Mengembangkan kurikulum PKn yang komprehensif dan relevan. Kurikulum PKn harus mencakup berbagai aspek demokrasi, seperti sejarah, prinsip-prinsip, dan praktik-praktiknya (Irfiani, 2024). (2) Meningkatkan kualitas pelatihan guru yaitu guru perlu dilatih dengan baik dalam hal pengajaran PKn yang efektif, termasuk metode pengajaran yang berpusat pada siswa dan pembelajaran berbasis proyek (Djajadi, 2020). (3) Menciptakan budaya sekolah yang mendukung demokrasi yaitu sekolah harus menciptakan lingkungan yang inklusif dan partisipatif di mana siswa merasa dihargai dan didorong untuk menyuarakan pendapat mereka. (Sulistiyono, 2023). (4) Melibatkan orang tua dan masyarakat yaitu orang tua dan masyarakat harus dilibatkan dalam program PKn dan diberi kesempatan untuk memberikan masukan dan dukungan. (Zahra & Nabila, 2024). (5) Melakukan penelitian dan evaluasi yang berkelanjutan yaitu penelitian dan evaluasi yang berkelanjutan diperlukan untuk menilai efektivitas program PKn dan membuat perbaikan yang diperlukan. (Firman et al., 2021)

Menilai efektivitas program pendidikan kewarganegaraan dalam mempromosikan nilai-nilai demokrasi adalah tugas yang kompleks dan berkelanjutan. Dengan menggunakan pendekatan multi-metode, membangun indikator yang jelas, dan mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi efektivitas, kita dapat terus meningkatkan program PKn dan membantu generasi penerus untuk menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. (Wulandari et al., 2024).

## Simpulan

Demokrasi adalah proses pengambilan keputusan di masyarakat yang idealnya melibatkan dialog dan diskusi yang rasional, inklusif, serta toleran di antara individu dan kelompok yang beragam. Menilai seberapa efektif program pendidikan kewarganegaraan (PKn) dalam mengajarkan nilai-nilai demokrasi adalah tugas yang rumit dan memerlukan berbagai sudut pandang. Menilai sejauh mana program pendidikan kewarganegaraan efektif dalam mempromosikan nilai-nilai demokrasi adalah tugas yang rumit dan berkesinambungan. Dengan menerapkan pendekatan multi-metode, membangun indikator yang jelas, serta mempertimbangkan berbagai faktor yang memengaruhi efektivitas, kita dapat terus memperbaiki program PKn dan membantu generasi mendatang menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

## Referensi

- Adenta, A. G., Ichwansyah, E. D., & Anggraini, R. (2024). Implementasi Pembelajaran Kewarganegaraan Sebagai Upaya Menanggulangi Kasus Toleransi dan Diskriminasi di Sekolah. *Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 3, 1-12.
- Declara, D. P. S. (2024). Implementasi Pendidikan Hak Asasi Manusia Melalui Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 1(3), 9.
- Djajadi, M. (2020). Efektivitas pendidikan dan pelatihan guru: suatu upaya meningkatkan kualitas pengajaran fisika. *Jurnal Sipatokkong BPSDM Sulsel*, 1(1), 30-45.

- 
- Eli Nurlaela, Maman Hermawan, E. N. dan J. S. (2020). *Pendidikan Kewarganegaraan bagi Mahasiswa Milenial*. (Medan: Amafrad Press Gedung).
- Firman, M., Firdausyi, M. F., Suswandy, S., & Rusdiana, D. (2021). Pengukuran Kesuksesan Pendidikan Inklusif: Pengembangan Indikator Kinerja dan Evaluasi. *Journal On Education*, 3(4), 629-642.
- Goli, N. H., & Santosa, S. (2023). Urgensi Pendidikan Toleransi Antar Umat Beragama di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 12(2), 28-39.
- Irfiani, I. (2024). Menggabungkan Elemen Sejarah Pendidikan Kewarganegaraan untuk Menciptakan Perspektif yang Menarik dan Unik dalam Pembelajaran PKN. *Blantika: Multidisciplinary Journal*, 2(8), 766-773.
- Julfian, J., Rejeki, S., Handayani, S., Sarilan, S., Rizki, A. N., & Lasmi, L. (2023). Peranan Pendidikan Kewarganegaraan dalam Membentuk Rasa Cinta Tanah Air pada Siswa. *Jurnal Keilmuan Dan Keislaman*, 210-224.
- Lubis, M. A. A. (2023). Peran Pendidikan Politik Dalam Pembentukan Warga Negara Yang Berbudaya Demokratis. *Literacy Notes*, 1(2), 1-11.
- Marbun, S. (2023). Membangun Dunia Yang Berani: Menegakkan Keberagaman Dan Kemajemukan Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 3(1), 20-34.
- Moh. Ferdi Hasan, N. H. dan D. M. (2023). Efektivitas Penanaman Nilai Karakter Demokratis Dalam Meningkatkan Minat Belajar Siswa. *STAINU Purworejo: Jurnal As Sibyan Jurnal Kajian Kritis Pendidikan Islam Dan Manajemen Pendidikan Dasar*, 6(2), 90-102.
- Purnomo, R., Tinggi, S., & Hukum, I. (2023). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam. *DESANTA (Indonesia of Interdisciplinary Journal)*, 4(1), 179-188.
- Rukmini, B. S. (2021). Implementasi Nilai-Nilai Demokrasi Dalam Pembelajaran Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan. *Jurnal Pendidikan Dewantara: Media Komunikasi, Kreasi dan Inovasi Ilmiah Pendidikan*, 7(1), 40-47.
- Sari, E. C. F., & Rambe, Z. B. P. (2024). Pendidikan Kewarganegaraan dalam Mengatasi Krisis Karakter Pemuda di Era Digital: Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(6).
- Sulistiyono, A. (2021). Peran guru dalam menanamkan nilai-nilai demokrasi melalui budaya sekolah. *Mahaguru: Jurnal Pendidikan Guru Sekolah*, 2(2), 1-8.
- Wulandari, A., Alfiani, F., & Saputra, T. (2024). Pentingnya Mengintegrasikan Pendidikan Kewarganegaraan dalam Kurikulum Sekolah Melalui Perspektif Global. *Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 1(3).
- Zahra, F. A., & Nabila, D. (2024). Pendidikan Demokrasi Sebagai Alat Penguat Kebhinekaan Dan Toleransi Di Sekolah. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 2(4), 157-168.